

**PENDEKATAN HUMANISTIK UNTUK PENCAPAIAN KAWASAN INKLUSIF YANG
RAMAH DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA
(Studi Pada Armada Difabike)**

Dyaloka Puspita Ningrum

Universitas Widya Mataram

Email: dyalokapuspita@yahoo.co.id

ABSTRAK

Konsep akan kawasan inklusif yang sudah banyak diusung oleh setiap daerah tentu harus diseimbangi dengan kebutuhan masyarakatnya, terutama pada kelompok marginal seperti para penyandang difabel berdasarkan instrumen penilaian Unesco (2017). Kehadiran armada difabike menjadi pelopor untuk mengubah stigma negatif masyarakat terhadap keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang difabel sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk melihat perkembangan yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan di Kota Yogyakarta dalam mencapai keberhasilan kawasan inklusif tersebut. Pendekatan humanistik “*bagaimana memanusiakan manusia*” yang berpegang pada aspek kepastian dan keadilan diharapkan dapat dioptimalkan oleh semua pihak sesuai dengan informasi yang tertuang di dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana, penataan, bantuan serta edukasi yang memudahkan para penyandang difabel sebagai bagian dari kelompok marginal dalam melakukan fungsi sosialnya diruang publik memang masih belum memadai. Secara keseluruhan menciptakan layanan ramah difabel yang aman dan nyaman harus dilaksanakan sesegera mungkin, khususnya melalui program pemberdayaan masyarakat yang bersifat konstruktif dan tepat sasaran di era pandemi saat ini.

Kata kunci: Humanistik, Kawasan Inklusif, Ramah Difabel

ABSTRACT

The concept of an inclusive area that has been widely promoted by each region must of course be balanced with the needs of its community, especially for marginal groups such as people with disabilities based on the Unesco assessment instrument (2017). The presence of the disabled fleet has become a pioneer in changing the community's negative view of the limitations of people with disabilities themselves. This study uses a qualitative case study method to see the progress made by policy makers in the city of Yogyakarta in achieving the success of the inclusive area. The humanistic approach of "how to humanize humans" which adheres to the aspects of appropriateness and justice is expected to be optimized by all parties in accordance with the information contained in the Republic of Indonesia Law Number 8 of 2016. The results of the study show that the facilities, arrangements, assistance and education that facilitate the Persons with disabilities as part of a marginal group in carrying out their social functions in the public sphere are still inadequate. Overall, creating safe and comfortable disabled-friendly services must be implemented as soon as possible, especially through community empowerment programs that are constructive and on target in the current pandemic era.

Keywords: Humanistic, Inclusive Area, Disable Friendly

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan inklusif saat ini sudah menjadi *trend* yang mulai banyak diusung oleh setiap daerah terutama mengenai kawasan inklusif, baik desa inklusif maupun kota inklusif. Kondisi tersebut selaras dengan salah satu visi Indonesia di tahun 2045 tentang masyarakat yang inklusif dengan mewujudkan akses terhadap keadilan, partisipasi dalam penyusunan kebijakan, serta pengentasan kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, upaya pembangunan inklusif tidak hanya terfokus pada pencapaian indikator pembangunan manusia sebagai output capaian, melainkan juga terkait dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun kelompok didalam masyarakat yang ditinggalkan ataupun dihalangi dalam mengakses layanan pembangunan yang disediakan oleh pemerintah (ombudsman.jogjaprov.go.id). Berdasarkan instrument penilaian Unesco (2017) konsep inklusif di Indonesia lebih mengarah kepada isu-isu difabel.

Keberagaman dan keunikan masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri. Naluri manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sejatinya mengharuskan mereka untuk terus berinteraksi dengan orang lain, sekalipun di dalam suatu kelompok kecil. Kelompok merupakan tempat manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mengembangkan potensi dan aktualisasi diri di dalam sistem sosial. Menurut (Soekanto,2006) kelompok diartikan sebagai himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, memiliki hubungan timbal balik, dan memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong.

Kelompok penyandang disabilitas dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 merupakan “setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental/intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial”. Secara terminologi yang lebih ramah kelompok tersebut biasa disebut dengan nama kaum difabel.

Keberadaan kaum difabel cukup diminoritaskan karena keterbatasan yang dimilikinya. Kelompok ini bahkan sering dipandang sebelah mata sebagai pihak yang tidak produktif dan tidak efektif dalam melakukan aktivitas di kehidupan normal. Kekurangan yang dirasakan oleh kaum difabel menjadi sebuah diskriminasi terhadap individu ataupun suatu kelompok, seperti : penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk di sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi atlet penyandang

disabilitas di tingkat dunia, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas (dalam Rotinsulu et al., 2012: 4-6). Padahal disisi lain, kelompok tersebut juga memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan secara mandiri.

Menariknya, kehadiran Armada Difabike di Kota Yogyakarta merupakan salah satu kelompok dari para penyandang difabel yang secara mandiri dapat memberdayakan antar sesama mereka dan bahkan telah diakui oleh dunia sebagai pelopor sarana transportasi yang ramah difabel. Industri layanan jasa ini berupaya membangun kehidupan sosial dengan merangkul berbagai *stakeholders*. Ada beberapa program pemberdayaan sosial terhadap kelompok para penyandang difabel di Kota Jogja yang setiap tahunnya kerab kali diberikan oleh pemerintah seperti : menjahit, memasak, koperasi, ataupun beternak (*berdasarkan hasil penelitian dilapangan, juli 2021*). Namun deretan program tersebut dirasakan masih belum begitu relevan menyasar pada kebutuhan penyandang difabel itu sendiri.

Di sisi lain, Kota Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang cukup serius berkomitmen dalam mengagas konsep tersebut. Namun dalam praktiknya fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik yang ramah difabel khususnya untuk penyandang difabel sampai saat ini masih relatif sangat terbatas sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan fungsi sosial di dalam masyarakat. Kondisi itulah juga yang dirasakan oleh para pengemudi armada difabike. Hal tersebut tentu saja tidak sejalan dengan prinsip moral atas kesetaraan hak, kewajiban dan kedudukan yang sama untuk para penyandang difabel sebagai Warga Negara Indonesia, seperti informasi yang tertuang dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2016.

Para pemangku kebijakan harus dapat memahami permasalahan, memetakan kebutuhan, dan mengembangkan potensi para penyandang difabel di Kota Jogja guna mencapai keberhasilan akan kawasan inklusif, khususnya yang ramah difabel. Pendekatan psikologi humanistik Abraham Maslow (dalam Minderop, 2011 :49) sangat memperhatikan tentang dimensi manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi dengan menitikberatkan pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya, nilai-nilai, tanggung jawab, tujuan dan pemaknaan, diharapkan dapat menjadi pijakan yang paling relevan akan perlindungan serta pemenuhan hak-hak kelompok penyandang difabel. Pendekatan tersebut pada prinsipnya dapat menjadi refleksi untuk seluruh elemen masyarakat dalam menyamaratkan kedudukan maupun status kelompok penyandang difabel yang lebih layak dan pantas, sehingga dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan kawasan inklusif yang ramah difabel terutama di tengah

industri saat ini, karena sangat bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat yang rentan dan sering termarginalkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam melihat perkembangan kawasan inklusif yang ramah difabel di Kota Yogyakarta. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2010). Peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui kegiatan observasi dan wawancara mendalam yang berkaitan dengan tema penelitian. Informan penelitian juga dipilih secara *purposive* yaitu *founder* dan *driver* armada difabike, serta pihak pemerintahan yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai realisasi aksesibilitas maupun mobilitas yang ramah difabel di Kota Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat atas keresahan yang sering dialami Triyono sebagai bagian dari kelompoknya, armada difabike tidak sengaja dirintis karena terbatasnya pembangunan, infrastruktur, maupun edukasi untuk membantu kelompok difabel dalam berinteraksi dan bekerja di ruang publik. Sehingga kondisi tersebutlah yang juga mendorong sang inisiator untuk membuka lapangan pekerjaan dengan fokus pada aspek pemberdayaan khususnya terhadap sesama difabel yang dilatar-belakangi tingkat pendidikan yang rendah. Bahkan secara serius armada difabike memiliki visi dan misi.

Driver armada difabike menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengantar jemput para penumpang tanpa terkecuali, baik itu wisatawan lokal, wisatawan domestik, maupun wisatawan mancanegara sekitar 4-5 trip dalam seharinya. Namun, di masa pandemi covid-19 yang masih belum menunjukkan titik terang, ternyata berdampak juga terhadap operasional difabike, terutama dari sisi perekonomian yang semakin memburuk karena berkurangnya *orderan* dan tentu saja fenomena tersebut kembali menambah deretan panjang permasalahan yang terus menghimpit kelompok difabel yang tidak hanya di Kota Yogyakarta melainkan juga dimanapun mereka berada.

Dikenal sebagai daerah yang istimewa, kelompok armada difabike bahkan tidak ketinggalan untuk menyampaikan aspirasinya kepada para pemangku kebijakan, terutama dalam hal

memperbaiki layanan mobilitas untuk penyandang difabel Se-DIY sebagai bagian dari salah satu target program kawasan inklusif yang telah banyak digencarkan, namun memang opsi tersebut masih belum memberikan jawaban seperti yang diharapkan. Menyoroti keberadaan penyandang difabel di kota jogja, khususnya yang memiliki perekonomian kelas ke bawah tentu hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan beberapa pekerjaan tertentu saja, misal: ada yang menjadi tukang pijat, tukang parkir, tukang koran, ataupun hanya sekedar menjadi pedagang di pinggir jalan.

Padahal ada beberapa kebijakan afirmasi yang disusun pemerintah kota jogja untuk mencapai kawasan inklusif, antara lain menysasar pada 5 kelompok prioritas seperti: kelompok miskin, kelompok lansia, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, dan kelompok difabel. Disampaikan secara langsung oleh Wakil Walikota Yogyakarta yang juga sekaligus merupakan Ketua Pokja menuju Kota Jogja Inklusif (*hasil wawancara peneliti di lapangan, juli – September 2021*), bahwa biaya untuk pencapaian kawasan inklusif inipun berasal dari berbagai sumber anggaran, baik dana murni pemerintah, APBN, ataupun sponsor.

Secara khusus, fokus kebijakan pada sasaran kelompok difabel sendiri diharapkan juga dapat diseimbangi dengan perlengkapan infrastruktur yang memenuhi standar untuk kepentingan para penyandang difabel. Minimal adanya transportasi, pelayanan, alat bantu dan simbol “kursi roda” / *braille* disetiap ruang publik sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap aktivitas para penyandang difabel maupun kelompok armada difabike.

Orientasi pencapaian kawasan inklusif harus berpedoman dengan kebutuhan sosial para penyandang difabel berdasarkan implementasi kebijakan sebelumnya guna menghasilkan akses yang benar-benar memudahkan kelompok penyandang difabel dalam melakukan fungsi sosialnya. Esensi pesan yang disampaikan pun harus berkaitan dengan isu-isu yang informatif. Aspek komunikasi mengambil peranan yang sangat penting, terutama dengan adanya komunikasi yang bersifat dua arah untuk mengurangi berbagai hambatan.

Disisi lain, evaluasi terhadap produk kerja pemerintah harus dicermati dengan seksama agar tidak hanya berwujud retorika politik semata. Tumbuhnya motivasi untuk mengembangkan potensi diri dari kelompok penyandang difabel fisik di kota jogja turut menjadi langkah untuk mengatasi problema yang dihadapinya. Kota jogja sebagai pelopor bisnis transportasi yang ramah difabel ini, diharapkan dapat membawa perubahan untuk menjadikan kelompok penyandang difabel lebih naik kelas ke taraf hidup yang semakin baik lagi. Armada difabike mampu memecahkan masalah dan

mengubah suatu harapan untuk tidak bergantung pada suatu pekerjaan yang mengikat sebagai syarat mutlak yang umumnya ada di masyarakat.

Sama halnya seperti pelaksanaan program komunikasi pemasaran yang dinyatakan oleh Ningrum (2018) “yang mana harus memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri sebagai sebuah seruan kolektif dari setiap substansinya agar dapat memberikan hasil yang maksimal”. Terutama yang terjadi pada kelompok armada difabel sebagai salah satu bisnis transportasi penyandang difabel yang ada di Kota Jogja. Sehingga prospek wirausaha pun dapat menjadi alternatif pekerjaan yang tetap mengedepankan nilai humanis untuk dapat bertahan hidup ditengah himpitan yang menerpa.

Dalam konteks inipun, sangat dibutuhkan juga sumbangsi dari para difabel milenial di industri 4.0 sebagai kaum muda yang lebih adiktif dengan penggunaan teknologi agar dapat meregenerasi para penyandang difabel lainnya diberbagai sektor, khususnya sebagai *start-up* yang sukses dan mandiri di era sekarang. Kontribusi, kesadaran dan komitmen dari segala pihak sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan kawasan inklusif yang setara dan berkeadilan di Kota Jogja. Peningkatan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja yang produktif dengan sasaran penyandang difabel sebagai kelompok yang sering terpinggirkan, sebisa mungkin harus dapat diadaptasikan dengan industri saat ini, terutama yang berbasis digital untuk menghasilkan individu lebih modern, berkualitas dan berdaya saing di dalam suatu kawasan inklusif yang berkelanjutan, seperti : pelatihan programmer, konten kreator, *dropshopper*, desain, dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 harus mnjadi pedoman pemerintah untuk terus mengubah paradigma secara inklusivitas dalam meminimalisir kesenjangan sosial terhadap proses pembangunan dan pemerataan yang tidak hanya pada skala nasional saja maupun juga pada skala regional demi mencapai kesejahteraan yang merata. kemampuan komunikasi terkini dan inovasi terhadap program pemberdayaan bagi para penyandang difabel sebagai bagian dari kelompok sasaran utamanya menjadi salah satu indikator yang dapat mendukung percepatan kawasan infklusif.

Penyediaan dan pembenahan fasilitas umum yang berperspektif ramah difabel di Kota Jogja dapat di mulai dari bangunan, gedung, objek wisata sampai dengan transportasi yang aksesibel. Kesiapan dari sisi jaminan kesehatan yang cukup responsif dan manusiawi di masa pandemi sekarang ini, tidak kalah pentingnya juga untuk disoroti agar pelaksanaan program ini sendiri dapat berjalan dengan sangat baik, termasuk dalam hal pendistribusian vaksinasi Covid-19 yang sudah

merata dibagikan pada kelompok tak berdaya, termasuk pada seluruh anggota armada difabike dan kelompok penyandang difabel lainnya.

Perhatian Pemerintah Kota Jogja akan kawasan inklusif diharapkan dapat meningkatkan motivasi kelompok yang termarginalkan, terutama dengan kekuatan budaya dan kearifan lokal Jogja yang sangat mengedepankan sikap toleransi di masyarakatnya. Target kawasan inklusif yang ramah difabel di Kota Jogja harus terus dikaji, terwujudnya lingkungan fisik yang anti diskriminasi salah satunya dapat dicapai dengan keterbukaan informasi publik yang dapat dioptimalkan sebagai urgensi dengan menggandeng para pelaku yang terlibat didalamnya. Tidak hanya menuju Kota Jogja yang inklusif, upaya inipun bermanfaat untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam memperkuat harmoni kehidupan beragama yang semakin berkualitas.

KESIMPULAN

Pembangunan kawasan inklusif semakin menarik perhatian dan dianggap penting karena diharapkan dapat menurunkan ketimpangan maupun kesenjangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kawasan inklusif yang ramah difabel khususnya di Kota Jogja dapat mengarah pada investasi fasilitas publik yang sampai sekarang ini masih belum begitu memadai untuk dapat diakses oleh para penyandang difabel, terutama oleh kelompok armada difabike yang secara mobilitas kerab kali menghabiskan waktu untuk operasionalnya. Berbagai program kerja yang telah dirancang oleh para pemangku kebijakan, setidaknya juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kelompok yang kurang diuntungkan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pihak yang telah mendanai penelitian ini selama satu tahun belakang. Kemudian tidak ketinggalan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu, terutama pada *Founder* dan *Driver* armada difabike, Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Segenap Sivitas Akademika di lingkungan FISIPOL UWM. Semoga hasil analisis di lapangan terkait tema penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kebijakan untuk mampu memberikan inovasi akan program pemberdayaan dan pendampingan kelompok difabel yang tepat sasaran sesuai dengan perkembangan jaman untuk semakin memaksimalkan pencapaian kawasan inklusif khususnya yang ramah difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Minderop, Albertine. 2011. *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Ningrum, D. P., Adhrianti, L., & Gushevinalti, G. (2018). STRATEGI KOMUNIKASI PARIWISATA KOTA BENGKULU: Studi Unique Selling Proposition Program Visit 2020 Wonderful Bengkulu. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, 8(1), 45-55
- Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. *Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta
- Rotinsulu, Maulani, et al. (2012). *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016. *Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta
- UNESCO. 2017. *Instrumen Penilaian Kota Inklusif Versi 2*. Kantor Perwakilan UNESCO, Jakarta
- Wiryanto.2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- http://bappeda.jogjaprovo.go.id/karya_perencanaan/detail/49-implementasi-jaminan-kesehatan-khusus-jamkesus-sebagai-salah-satu-upaya-pemenuhan-dan-perlindungan. Diakses pada tanggal 17 September 2021

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Proses Wawancara Tim Peneliti dengan Wakil Walikota Yogyakarta selaku Ketua Pokja Menuju Kota Jojga Inklusi (2021)



Proses Wawancara Tim Peneliti dengan Founder Difabike (2021)